



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARTINUS PONES**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **471932**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 718.000.000**

1. Tanah Seluas 453 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. Tanah Seluas 228 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 68.000.000
3. Tanah Seluas 14.228 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 310.000.000
5. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
6. Tanah Seluas 5.000 m2 di KAB / KOTA KOTA SINGKAWANG , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 97.000.000**

1. MOBIL, SUZUKI JIMNY JEEP Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
2. MOTOR, PIAGGIO VESPA LXV 150 3V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



4. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.039.672
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	817.039.672
III. HUTANG	Rp.	87.437.986
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	729.601.686

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.